

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Berdasarkan Perspektif Pendidikan Moderasi Beragama Muhammadiyah Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan

Yuyu Yuliasih², Richard Rachmatullah³

¹Univerasitas Muhammadiyah Tangerang; yuyuyuliasih08@gmail.com

²Univerasitas Muhammadiyah Tangerang; richard.rachmatullah19@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Transformasi;
Perpustakaan;
Inklusi Sosial;
Pendidikan; Moderasi;
Muhammadiyah; K.H.Ahmad
Dahlan

Article history:

Received 2024-12-29

Revised 2025-01-03

Accepted 2025-01-03

Corresponding Author:

Yuyu Yuliasih
Universitas Muhammadiyah
Tangerang;
yuyuyuliasih08@gmail.com

CopyRight:

This is an open access article under
the [CC BY-NC-SA](#) license.



ABSTRACT

This study aimed to determine the Program Library Transformation Base On Social Inclusion (LTBSI) Base On Perspective Education Religious Moderation Muhammadiyah According To Thought K.H. Ahmad Dahlan. In improving students abilities, between programs LTBSI with Perspective Education Religious Moderation Muhammadiyah According To Thought K.H. Ahmad Dahlan, have something in common, namely both inclusive and moderate without distinguishing background as gender, physical appearance, racial, ethnic, religion, social status, and economics as both emphasizing the existence of bias towards marginalized communities. Data analyzed in this study using the literature review method, data sources in the form of book, relate journal, as well as article wich is published national journal, show that the Program LTBSI is a program National Library of the Republic of Indonesia who has a very appropriate perspective and inspired by the pillars Base On Perspective Education Religious Moderation Muhammadiyah According To Thought K.H. Ahmad Dahlan, namely (1) there is an attitude national commitment, (2) there is an attitude tolerance, (3) there is an attitude not extreme (not-violence), and (4) there is an attitude accommodating to local culture values. The program LTBSI, in improving the welfare of marginalized communities by the National Library of the Republic of Indonesia, attitude has been adopted "wasathiyah" "middle way", with principles tawassuth (not extreme), moderat (moderation, middle way, balance, justice), dan tasamuh (there is an attitude tolerance, relieve, mutual respect), and this fits perfectly and according to condition plural nation like in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Berdasarkan Perspektif Pendidikan Moderasi Beragama Muhammadiyah Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan. Dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, antara Program TPBIS dengan perspektif pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, memiliki kesamaan yaitu sama-sama bersifat inklusif dan moderat tanpa membedakan-bedakan latar belakangnya, seperti gender, kondisi fisik, ras, etnis, agama, status sosial, dan ekonomi serta sama-sama menekankan adanya keberpihakan terhadap masyarakat yang termarginalkan.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini dengan metode kajian pustaka, dari sumber data berupa buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan, maupun artikel-artikel yang terbit di jurnal nasional, menunjukkan bahwa program TPBIS merupakan program Perpustakaan RI yang memiliki perspektif yang sangat sesuai serta dijiwai oleh pilar-pilar pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, yaitu (1) adanya sikap komitmen kebangsaan, (2) adanya sikap toleransi, (3) adanya sikap anti kekerasan, serta (4) adanya sikap akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Pada program TPBIS tersebut, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termarginalkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, telah diterapkan sikap "*wasathiyah*" "jalan tengah" dengan prinsip-prinsip *tawassuth* (tidak ekstrem), *moderat* (cenderung ke arah jalan tengah, berkeselimbangan, berkeadilan), dan *tasamuh* (sikap toleransi, tenggang rasa, lapang dada, saling menghormati), dan ini sangat cocok dan sesuai dengan kondisi Bangsa Indonesia yang plural.

1. PENDAHULUAN

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI) telah secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya yang bersifat inklusif, yaitu pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan tanpa membedakan suku, agama, dan status sosialnya, diantaranya melalui Program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) pada Perpustakaan Umum yang ada di Indonesia (Perpusnas RI, 2024). Perpusnas RI, untuk ini sedang membangun upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, agar tercipta ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga akan terbangun peningkatan kemampuan literasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat inklusif (Dipusipda Kota Tasikmalaya, 2024). Sifat inklusif pada program TPBIS tersebut sangat sesuai dengan perspektif pendidikan moderasi beragama muhammadiyah menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, yang memiliki 4 pilar utama yaitu (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti kekerasan, dan (4) akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dalam perspektif tersebut, semua lapisan masyarakat (terutama masyarakat yang termarginalkan) secara inklusif memiliki peluang yang sama terhadap perpustakaan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan latar belakangnya, baik dari gender, kondisi fisik, ras, etnis, agama, budaya, status sosial, dan ekonomi.

Program TPBIS ini sejalan dengan moderasi beragama di Indonesia yang mengharuskan sikap inklusif dan terbuka, serta menghindari ekstremisme, demi mempersatukan bangsa yang beragam melalui nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Konsep moderasi beragama ini penting dalam menciptakan kehidupan harmonis dan mencegah konflik agama (Hasbullah, 2024). Islam, sebagai agama mayoritas, memiliki ajaran moderasi beragama yang disebut "*wasathiyah*" "jalan tengah" dengan prinsip-prinsip *tawassuth* (tidak ekstrim), *moderat* (cenderung ke arah jalan tengah), dan *tasamuh* (sikap toleransi,

tenggang rasa, lapang dada, saling menghormati). Yang menekankan keseimbangan dan keadilan.

Dalam program TPBIS, sejalan dengan moderasi beragama yang telah diterapkan melalui Pancasila dan UUD 1945 yang menghargai kebhinekaan, serta mengajak semua agama untuk berperan dalam menjaga harmoni dan dialog antarbudaya tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial, melalui implementasi 9 kunci moderasi beragama yaitu (1) kemanusiaan, (2) kemaslahatan umum, (3) adil, (4) berimbang, (5) taat konstitusi, (6) komitmen kebangsaan, (7) toleransi, (8) anti kekerasan, serta (9) penghormatan kepada tradisi (Nina, 2023).

Inklusi sosial adalah sebuah proses bagi individu atau kelompok untuk ikut berperan serta dalam masyarakat secara terbuka. Inklusi sosial memiliki komitmen kebangsaan untuk kemaslahatan umum dalam memberdayakan masyarakat miskin yang termarginalkan. Melalui pendekatan inklusi sosial diharapkan dapat mendorong seluruh lapisan elemen masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Inklusi sosial mengacu pada semua upaya dan kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan kepada masyarakat secara terbuka dari semua keadaan dan dari semua kategori yang dikecualikan secara sosial. Dalam perspektif ini, program inklusi sosial perpustakaan telah menerapkan komitmen kebangsaan untuk kemaslahatan umum sebagai pilar moderasi beragama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perihal konsep inklusi sosial, tentu memiliki hubungan dengan perpustakaan daerah/umum, karena sama-sama menyinggung mengenai kesetaraan dan keterbukaan dalam memberikan layanannya. Dalam hal ini inklusi sosial memiliki prinsip berkeadilan dan berkeselimbangan, dalam upaya membuat masyarakat saling terbuka terutama pada masyarakat rentan atau berpotensi termarginalkan, salah satunya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka (kualitas taraf hidup mereka). Dalam perspektif ini, program inklusi sosial perpustakaan telah menerapkan prinsip berkeadilan dan berkeselimbangan sebagai prinsip moderasi beragama terutama untuk masyarakat-masyarakat yang rentan termarginalkan.

Jika kita melihat definisi perpustakaan daerah/umum itu sendiri yaitu perpustakaan yang digunakan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan latar belakangnya, baik dari gender, kondisi fisik, ras, etnis, agama, budaya, status sosial, dan ekonomi. Itu berarti konsep inklusi sosial perpustakaan sangatlah cocok untuk diimplementasikan di perpustakaan daerah/umum, dengan prinsip toleransi sebagai pilar moderasi beragama. Karena paradigma perpustakaan daerah/umum terkini adalah sebagai wahana masyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat secara terbuka dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (kualitas taraf hidup masyarakat), dan ini sejalan dengan konsep inklusi sosial pada Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Inklusi sosial merupakan model transformasi yang kini dikembangkan perpustakaan daerah/umum, yaitu berupa layanan perpustakaan dengan berbasis ruang belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka yang disertai dengan adanya pendampingan

pembelajaran yang diberikan oleh pustakawan untuk mewujudkan keinginan dari masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya (kualitas taraf hidupnya). Sehingga masyarakat akan merasakan langsung bahwa dengan kehadiran perpustakaan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Keinginan masyarakat yang dimaksud, yaitu melalui inklusi sosial perpustakaan, akan mengakomodasi keinginan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat lokal. Misalnya inklusi sosial berupa pendampingan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan usaha dan keterampilan bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang berbasis budaya lokal, pedagang kaki lima yang berbasis makanan-makanan dengan nuansa budaya lokal, kelompok PKK yang berbasis fashion dan asesoris yang berbasis budaya lokal, pemberdayaan petani, pemberdayaan peternak, pemberdayaan masyarakat prasejahtera, pegiat literasi dan lain-lain yang berbasis budaya lokal. Dalam perspektif ini, inklusi sosial perpustakaan telah menerapkan pilar moderasi beragama, yaitu akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Penerapan program TPBIS yang bersifat inklusif tersebut, sangat sesuai dengan perspektif pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, dalam konteks tafsir agama dan keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Karena dalam pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, pendidikan moderasi beragama dalam konteks keragaman agama dan tafsir agama di Indonesia, akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, sehingga selalu bersikap adil dan berimbang dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dan sumber data dalam kajian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan, maupun artikel-artikel yang terbit di jurnal nasional. Kajian literatur ini memiliki beberapa tahapan-tahapan yang digunakan, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data, pembahasan hingga kesimpulan.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

Konsep Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Konsep TPBIS telah disampaikan oleh Perpustakaan Nasional, dalam berbagai ajang kegiatan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional (Perpustakaan RI, 2023), diantaranya sebagai berikut.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) digagas oleh Pemerintah Indonesia melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpustakaan RI) pada Tahun 2018 (Perpustakaan RI, 2023). Melalui tindakan nyata dan kemitraan yang terjalin, TPBIS menjadi wujud komitmen Indonesia terhadap pembangunan global dan berkesempatan untuk diperluas menjadi bagian dari Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) berkat Colombo Plan. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral,

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Tri Tharyat pada pembukaan Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS [Knowledge Sharing Program on Social Inclusion-Based Library Transformation (SILT)] di Ruang Auditorium Lt. 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan RI, Senin (13/11/2023). "Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan negara-negara anggota Colombo Plan lainnya dalam melakukan transformasi perpustakaan umum menjadi ruang inklusif", ujarnya. Lebih lanjut, Tri juga mengatakan bahwa melalui KSST, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat TPBIS sebagai sebuah program prioritas nasional yang dapat dijangkau dan diharapkan bermanfaat bagi sesama anggota *Colombo Plan*. "Bersama, kita akan mengubah perpustakaan umum dari sekedar tempat membaca buku menjadi tempat yang memberdayakan masyarakat sekitar", ajaknya.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Colombo, Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, Dewi Gustina Tobing menambahkan bahwa pada program ini Indonesia akan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada negara-negara anggota *Colombo Plan* lainnya tentang TPBIS. Program ini dapat memperkuat hubungan antar sesama negara anggota dan mendorong cara-cara inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki para negara anggota *Colombo Plan*", ucapnya. Menurut Dewi, Indonesia sangat mementingkan KSST karena sejalan dengan Konstitusi Nasional yang mengamanatkan Indonesia untuk memelihara ketertiban dunia berdasarkan nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta memainkan peran sentral dalam kerangka agenda pembangunan berkelanjutan 2030. "KSST adalah bagian integral dari diplomasi Indonesia dan *Colombo Plan* telah menjadi mitra yang sangat berharga di Dunia Selatan", ungkapnya.

Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara Noviyanti menekankan bahwa Indonesia, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, terus berkomitmen kuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program TPBIS, sebagai bagian dari upaya strategis tersebut, merupakan kemitraan antara Perpustakaan RI dan pemerintah daerah di berbagai tingkat. "Tujuannya adalah meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup pemustaka. Inisiatif ini telah berhasil mengubah perpustakaan umum menjadi ruang komunal yang memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat", katanya. Noviyanti mengajak peserta pelatihan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih memahami efektivitas pelaksanaan program TPBIS, meneliti kebijakan dan pedoman struktural yang mendukung transformasi perpustakaan. "Program inklusi sosial ini memiliki potensi luar biasa. Inklusi untuk perpustakaan bisa dikembangkan lebih lanjut, masih ada peluang yang bisa direplikasi di negara masing-masing, dan ini bisa menjadi suatu capaian secara global", tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Muhammad Syarif Bando menyampaikan saat ini Perpustakaan RI berkomitmen untuk membawa perpustakaan ke tingkat berikutnya dengan fokus pada inklusi sosial. "Hari ini, kami berkomitmen untuk membawa perpustakaan ke tingkat berikutnya dengan fokus utama pada inklusi sosial", ujarnya. Seiring dengan

perkembangan zaman, lanjutnya, paradigma eksklusif dalam dunia perpustakaan dianggap sudah tidak relevan. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perpustakaan memiliki peran vital dalam menyajikan pengetahuan kepada masyarakat. “Perpustakaan harus menjadi pelangi pengetahuan bagi jutaan masyarakat di pedesaan”, tambahnya. Dia menjelaskan dalam menyediakan akses pengetahuan, Perpustakaan RI telah menciptakan aplikasi digital BintangPusnas Edu yang berisikan lebih dari 60 juta buku, manuskrip, terutama untuk pembelajaran dari SD sampai perguruan tinggi. “Melalui aplikasi *mobile*, masyarakat dapat mengaksesnya tanpa biaya di mana saja, dari perangkat seperti ponsel, laptop”, jelasnya. Dalam upaya menjembatani kesenjangan antara daerah terpencil dan pusat pemerintahan, Kepala Perpustakaan RI menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bergabung dalam membantu masyarakat. “Kami berharap dukungan dari semua *stakeholder*, terutama pemerintah daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif”, ungkapnya. Dengan kehadiran peserta dari berbagai negara, Kepala Perpustakaan RI menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kunci keberhasilan manusia melalui transformasi perpustakaan. “Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memajukan perpustakaan sebagai sumber daya pengetahuan inklusif, menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan berkeadilan di berbagai lapisan masyarakat”, harapnya.

Perlu diketahui, Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS menghadirkan 18 peserta yakni 8 peserta berasal dari 6 negara anggota *Colombo Plan* (Laos, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, dan Myanmar) dan 10 peserta lainnya yang terdiri dari perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Seluruh peserta akan dilibatkan dalam pelaksanaan praktik baik berupa pelatihan dan visitasi ke perpustakaan Mutiara Rawa Binong, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, untuk meninjau fasilitas perpustakaan dan mengunjungi bazar produk hasil binaan TPBIS. Ada pula kunjungan kebudayaan ke Taman Mini Indonesia Indah untuk memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.

TPBIS merupakan kegiatan yang dilaksanakan Perpustakaan RI dengan melibatkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa/kelurahan) untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Melalui TPBIS, perpustakaan umum mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam memperoleh solusi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Sejak dicanangkan sebagai program prioritas nasional pada Tahun 2018, program TPBIS dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpustakaan RI, hingga Tahun 2022 telah diimplementasikan di 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan. Pada Tahun 2023, sejumlah 450 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS. Hingga Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lainnya.

Analisis Pendidikan Moderasi Beragama Muhammadiyah Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan

Analisis Pendidikan Moderasi Beragama Muhammadiyah Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, diambil dari tulisan Mohammad Dzaky Zaidan, Elisha Qotrunnada, Khansa Labiibah Hasna, dan Al Bani Ridho Pratama, dan Abdul Fadhl (2024) yang berjudul Moderasi Beragama Sebagai Pilar Kebhinekaan: Telaah Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Dahlan yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI) Volume 3 Nomor 4, Januari 2025, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia; Publish+artikel.pdf; 11 halaman . 248 kB . PDF. Dari tulisan tersebut, untuk analisis pada tataran teoritis telah disesuaikan dengan tulisan yang ditulis oleh Mohammad Dzaky Zaidan dkk. (2024) tersebut, sedangkan untuk analisis pada tataran praktis Penulis berikan telaahan pada tataran implementasi kebijakan pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah pada era sekarang ini, yang akan dijelaskan seperti berikut.

Analisis Pendidikan Moderasi Beragama Muhamammdiyah Pada Tataran Teoritis Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan

K.H. Ahmad Dahlan, merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah, yang didirikan pada Tanggal 18 November 1912, yaitu organisasi Islam terbesar saat ini yang ada di Indonesia. Pemikiran-pemikiran K.H. Ahmad Dahlan telah menginspirasi organisasi Muhammadiyah, untuk mencapai cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara dengan tujuan mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Al- Qur'an dan Hadis yang murni. Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan tetapi juga sosial dan pendidikan, dengan visi untuk memberdayakan masyarakat melalui pengajaran nilai-nilai Islam yang moderat yang bersifat inklusif dengan tanpa membedakan suku, agama, dan status sosialnya. Perspektif pemikiran ini telah diterapkan di Indonesia, bukan hanya oleh Muhammadiyah tetapi juga telah diterapkan oleh organisasi-organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia, seperti pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk program TPBIS, yang bersifat inklusif.

K.H. Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 dengan nama Muhammad Darwis. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat; ayahnya, K.H. Abu Bakar, adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sehingga tidak heran, jika sejak kecil K.H. Ahmad Dahlan telah memiliki pemahaman dengan ajaran Islam dan tradisi keagamaan yang kuat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Ahmad Dahlan melanjutkan studinya ke Makkah pada Tahun 1903 dan tinggal di sana selama dua tahun. Selama Di Makkah, beliau berguru kepada beberapa ulama terkemuka, termasuk Syekh Ahmad Khatib, yang juga merupakan guru dari K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024).

Dalam perjalanannya, Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan resistensi dari berbagai kalangan, termasuk tuduhan bahwa ia ingin mendirikan agama baru, K.H. Ahmad Dahlan tetap berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu untuk melakukan pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Sehingga pada Tahun 1914 walaupun dalam batasan yang ketat, beliau berhasil mendapatkan izin hukum untuk Muhammadiyah dari Pemerintah Hindia Belanda waktu itu.

Dalam konteks masyarakat yang plural Di Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan tentang moderasi beragama sangat relevan serta menjadi solusi untuk membangun pilar-pilar moderasi beragama yang meliputi (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti kekerasan, dan (4) akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Beliau memandang bahwa moderasi adalah kunci untuk mencapai keselarasan antara ajaran agama dan realitas sosial yang beragam. K.H. Ahmad Dahlan, memandang Agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa memandang perbedaan, sehingga tidak bersifat eksklusif. Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, dalam menginspirasi pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah, diantaranya dalam konteks, yaitu (1) purifikasi paham beragama, (2) dinamisasi paham beragama, serta (3) praktik moderasi beragama.

Purifikasi Paham Beragama Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan

Purifikasi masih merupakan prinsip/karakter gerakan Muhammadiyah (Ai Fatimah Nur Fuad, 2018). Salah satu ciri yang menonjol dalam gerakan Muhammadiyah adalah gerakan purifikasi (pemurnian) dan modernisasi (pembaharuan), atau *tajdid*, dari ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist (Akhlanudin Uhamka, 2016).

Hal tersebut sesuai dengan purifikasi paham beragama yang merupakan sebagai salah satu aspek penting dari pemikiran moderasi beragama K.H. Ahmad Dahlan. Yaitu melakukan pembaharuan terhadap ajaran Islam, dalam bentuk pemurnian ajaran Islam dari paham-paham *tahayul*, *bid'ah*, dan *churafat* (TBC), dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Beliau berusaha membersihkan ajaran Islam dari praktik-praktik *sinkretik* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip murni Islam. Dalam hal ini, beliau mendorong umat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024). Tafsir purifikasi penting dimaknai sebagai otentikasi proses mencari ajaran Islam yang sebenar-benarnya, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, 2024).

Dinamisasi Paham Beragama Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan

Persyarikatan Muhammadiyah benar-benar memahami serta mempraktikkan Islam di tengah dinamika kehidupan sepanjang zaman dalam pengayaan perspektif Islam berkemajuan. Dalam pengembangan dinamisasi beragama Muhammadiyah harus diperoleh substansi dan implementasi ajaran Islam yang mendalam, luas, dan multiperspektif menuju keyakinan, pemahaman, dan pengalaman Islam yang sebenar-benarnya (Haedar Nashir, 2023). Ke depan Muhammadiyah niscaya memiliki agenda strategis antara lain (1) memperkaya dan mendinamiskan fungsi-fungsi pembinaan keagamaan dalam kerangka *tarjih* dan *tajdid*, serta (2) *tabligh* yang bersifat dinamis dan transformatif (Haedar Nashir, 2021).

Hal tersebut sesuai dengan pemikiran dinamisasi paham beragama K.H. Ahmad Dahlan yang telah membuka pintu *ijtihad* (penalaran), sehingga dalam memahami ajaran agama, tidak bersifat *jumud* (yaitu sikap statis terhadap suatu adat sehingga tidak mau menerima perubahan). K.H. Ahmad Dahlan percaya bahwa umat Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar ajaran

Islam, dengan tetap berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Hadis (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024). Hal ini tercermin dalam pernyataannya bahwa "segala pengetahuan tidak akan bermanfaat apabila tidak dikerjakan sejalan dengan keadaan" (Tali Pengikat Hidup Manusia, 1923). Dengan demikian, moderasi beragama menjadi alat untuk menjembatani antara idealitas ajaran agama dan realitas kehidupan sehari-hari. Artinya dalam tafsir agamanya harus bersifat membumi yang berkeseimbangan dan berkeadilan dengan membuka ruang keberagaman tanpa bertentangan dengan ajaran Islam.

Praktik Moderasi Beragama Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan

Moderasi beragama adalah salah satu karakter utama yang membuat Muhammadiyah tidak hanya mampu bertahan, tetapi terus melangkah maju di tengah berbagai perubahan zaman, yaitu dengan mayoritas Muhammadiyah tetap berada "di tengah" (moderat) dalam memegang dan mengamalkan moderasi beragama (Seminar Munas Majelis Tarjih, PP Muhammadiyah, 2020). Keberadaan lembaga pendidikan Islam di tengah masyarakat yang beragam, moderasi beragama menjadi kata kunci untuk menampilkan wajah Islam yang santun dan toleran. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa moderasi beragama sebagai jalan tengah bagi masyarakat yang multikultural (Mayske Rinny Liando dan Hadirman, 2022).

Hal ini sesuai dengan pemikiran moderasi beragama menurut K.H. Ahmad Dahlan yang telah melakukan moderasi beragama secara inklusif melalui berbagai cara, termasuk *tabligh* (pengajaran). Beliau membuka dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk gereja dan Sekolah Katolik, untuk berdiskusi dan berbagi pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama Di Indonesia. Misalnya. K.H. Ahmad Dahlan suka bertukar gagasan dengan Romo Van Lith Di Kolese Xaverius yang sekarang bernama SMA Pangudi Luhur Van Lith di Muntilan, Magelang mengenai pendidikan yang ideal bagi rakyat pribumi. Perjalanan ke Muntilan ini menginspirasi K.H. Ahmad Dahlan untuk mengubah nama sekolahnya menjadi Kweekschool Islam. Sikap terbuka ini mencerminkan komitmennya terhadap moderasi beragama sebagai sebuah pendekatan komitmen kebangsaan yang dapat diterima oleh semua kalangan (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024). Perspektif ini sangat sesuai dengan program TPBIS yang bersifat inklusif, yang terbuka terhadap semua pemeluk agama untuk meningkatkan kesejahteraannya, terutama untuk masyarakat yang termarginalkan.

Selanjutnya, untuk bukti empiris mengenai pemikiran moderasi beragama K.H. Ahmad Dahlan dapat dilihat dalam perkembangan perjalanan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang menekankan nilai-nilai moderat dalam setiap kegiatan dakwahnya. Dasar pemikiran moderasi beragama, dalam Muhammadiyah, sejak awal berdirinya telah mempromosikan pendidikan yang inklusif dengan dialog antarumat beragama sebagai bagian dari misinya untuk membangun masyarakat yang harmonis berkeseimbangan dan berkeadilan. Sebagai contoh, saat Mukthamar ke-48 Muhammadiyah menghasilkan Risalah Islam Berkemajuan (RIB), di mana salah satu karakter utama organisasi ini adalah *wasathiyah* atau sikap tengahan dalam beragama. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi telah menjadi bagian integral dari identitas Muhammadiyah sejak awal

berdirinya, yang sesuai dengan perspektif pemikiran moderasi beragama K.H. Ahmad Dahlan (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024).

Sebagai pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam Di Indonesia. Gagasan-gagasannya mengenai hubungan harmonis antar agama dan pentingnya modernisasi dalam konteks Islam sangat relevan dalam menghadapi tantangan keberagaman yang ada di masyarakat. Dalam pandangannya, moderasi beragama bukan hanya sekedar teori, tetapi juga merupakan suatu keharusan untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama, sebagai wujud dari komitmen kebangsaan (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024).

Dialog dan kerjasama antarumat beragama sebagai landasan untuk menciptakan hubungan yang harmonis berkeselimbangan dan berkeadilan, telah dicetuskan K.H. Ahmad Dahlan dalam transkrip pidatonya pada Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1922, Beliau menyatakan bahwa setiap individu harus mampu menghargai perbedaan dan saling mengenal satu sama lain, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13 yang menegaskan bahwa umat manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa untuk saling mengenal. Hal ini menunjukkan bahwa sikap inklusif K.H. Ahmad Dahlan terlihat dari keterlibatannya dalam dialog dengan pemuka agama lain, termasuk Kristen. Beliau tidak merasa ragu untuk mengunjungi gereja dan berdiskusi dengan pendeta, menunjukkan bahwa ia menghargai perbedaan keyakinan sebagai bagian dari keragaman yang harus dirayakan. Hal ini sejalan dengan prinsip Muhammadiyah yang menekankan pentingnya pilar toleransi dalam moderasi beragama sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024).

K.H. Ahmad Dahlan percaya bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, yang berarti membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa memandang perbedaan. Dalam Islam, modernisasi harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Beliau mengadvokasi reformasi pendidikan Islam dengan mengadopsi sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama. Ia mendirikan lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tidak hanya fokus pada pengajaran agama tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan umum. Dengan demikian, ia berusaha mentransformasikan pemikiran umat Islam dari pola berpikir statis menjadi dinamis, sehingga mampu bersaing di era modern. Yaitu dengan membuka pintu *ijtihad* yang seluas-luasnya, tidak bersikap *jumud*, dengan tetap berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Hadis (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024).

Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dalam perspektif pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah dalam masyarakat yang multikultural seperti Di Indonesia, sikap moderat dan inklusif sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Gagasan-gagasannya tentang moderasi beragama mendukung toleransi dan keberagaman, serta memberikan landasan bagi masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai. Pemikiran Beliau tentang moderasi beragama telah terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis berkeselimbangan dan berkeadilan. Dalam tataran implementatif, sebagai contoh Muhammadiyah telah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan

dialog antaragama dan kerjasama lintas komunitas untuk membangun perdamaian di tengah konflik sosial. Seperti keterlibatan Muhammadiyah dalam mediasi konflik antaragama di Maluku pada Tahun 1999, dalam memfasilitasi dialog antara kelompok Muslim dan Kristen untuk meredakan ketegangan. Melalui pendidikan yang inklusif, Muhammadiyah juga telah berhasil menciptakan ruang bagi siswa dari berbagai latar belakang agama untuk belajar bersama, sehingga menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Ini menunjukkan bahwa pemikiran K.H. Ahmad Dahlan tentang pentingnya moderasi beragama tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang terdiri dari multi ras, suku, dan agama (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024).

Hubungan harmonis antar agama melalui pilar-pilar moderasi beragama tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan masyarakat yang toleran dan inklusif di Indonesia. Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan telah menjadi landasan bagi kebijakan Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dalam mengimplementasi pendidikan moderasi beragama di Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama serta mendorong umat Islam untuk terus melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024). Pada tataran implementasinya, melalui pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah akan dilahirkan lulusan dari para peserta didik yang memiliki sikap moderat dan inklusif, yang mana sikap ini seiring dengan perkembangan jaman akan semakin diperlukan untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis serta berkeadilan dan berkeadilan, di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural. Termasuk dalam pelaksanaan program-program pembangunan agar berjalan efektif, sikap moderasi beragama ini sangat dibutuhkan, seperti dalam implementasi program TPBIS yang bersifat inklusif yang dilaksanakan oleh Perpunas RI.

Analisis Pendidikan Moderasi Beragama Muhammadiyah Pada Tataran Implementatif Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan

Pemikiran pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah yang diajukan oleh K.H. Ahmad Dahlan sangat sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang plural. K.H. Ahmad Dahlan, melalui Muhammadiyah, menekankan pentingnya pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama, serta sikap terbuka terhadap perbedaan, yang bersifat inklusif. Gagasan-gagasan dapat dikembangkan melalui kurikulum pendidikan yang menekankan nilai-nilai moderasi dan dialog antaragama. Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya moderasi beragama termasuk kebijakan pemerintah yang mendukung dialog antarumat beragama dan program-program pendidikan yang inklusif. Pemerintah dapat berperan aktif dalam menciptakan ruang bagi diskusi dan kolaborasi antar kelompok agama, serta mendukung inisiatif masyarakat sipil yang mempromosikan toleransi. Selain itu, kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya dapat memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghargai di antara berbagai kelompok. Dengan demikian, upaya moderasi beragama dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga kebhinekaan di Indonesia (Mohammad Dzaky Zaidan dkk., 2024).

Pentingnya gerakan pendidikan moderasi bergama Muhammadiyah tidak lepas dari pemikiran K.H. Ahmad Dahlan yang melihat pendidikan sebagai prioritas utama dalam rekonstruksi masyarakat (Budiman, Murniyanto, dan Deri Wanto, 2022). Terutama untuk pemuda Muhammadiyah, pendidikan moderasi beragama memiliki peran yang sangat penting, karena mereka merupakan generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan, dalam pembangunan bangsa Indonesia yang multikultural (Ari Farizal Rasyid dan Anwar Taufik Rakhmat, 2023). Untuk ini Muhammadiyah telah berperan sebagai basis gerakan moderasi Agama Islam melalui pendidikan, khususnya untuk generasi muda Muhammadiyah, dengan menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan tengah yang bersikap moderat, tidak berlebih-lebihan, dan tidak ekstrem (Abdul Mu'ti, 2021). Muhammadiyah selalu mendengarkan pendapat dari berbagai perspektif, dalam melahirkan sebuah implementasi kebijakannya, termasuk dalam melahirkan implementasi kebijakan pendidikan moderasi beragama. Berikut ini adalah beberapa kebijakan pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah, yaitu (1) menghargai perbedaan agama dan keyakinan, (2) mendorong sikap toleransi dan saling menghormati, (3) mengajarkan nilai-nilai moderasi untuk mencegah pemahaman yang ekstrem dalam agama Islam, (4) menanamkan nilai-nilai beragama secara moderat, serta (5) menghargai hak tiap-tiap insan untuk memilih keyakinan serta cara hidup yang mereka anut. Beberapa bentuk implementasi moderasi beragama pada lembaga pendidikan Muhammadiyah diantaranya dakwah keagamaan di sekolah, kultur interaksi sosial-keagamaan, moderasi beragama dalam interaksi kelas, serta ajaran moderasi beragama melalui mata pelajaran, yang bertujuan untuk melahirkan sikap moderat dalam beragama Islam (Islam moderat).

Islam moderat, pada tataran implementasi pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah yaitu berdasarkan ajaran "*wasathiyah*" "jalan tengah" dengan prinsip-prinsip *tawassuth* (tidak ekstrem), *moderat* (cenderung ke arah jalan tengah), dan *tasamuh* (sikap toleransi, tenggang rasa, lapang dada, saling menghormati). Umat yang mengamalkan konsep Islam "*wasathiyah*" atau Islam moderat yang berkeselimbangan dan berkeadilan, umumnya akan menunjukkan ciri-ciri (1) keseimbangan dalam ibadah baik dalam keluarga maupun secara sosial, (2) toleransi dan penghormatan, dengan menghargai keberagaman tanpa diskriminasi, (3) keadilan dan kebijaksanaan, dalam segala hal, baik secara pribadi maupun dalam bermasyarakat, (4) menjaga akhlak mulia, menghindari perilaku kasar dan tindakan yang merugikan orang lain, (5) menghargai pentingnya pendidikan dan pengetahuan, (6) berperan aktif dalam masyarakat, (7) cenderung mencari pemahaman dengan dialog dan diskusi, (8) menghindari ekstremisme, (9) mengutamakan keadilan gender, (10) mengedepankan kesejahteraan sosial, (11) berempati dan peduli, serta (12) berperilaku moderat dalam konflik (Ayu Rifka Sitoresmi, 2023).

Hasil dari pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah pada tataran implementasi, dapat dilihat dari indikator keberhasilan pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah, yang akan tercermin dalam sikap pada kehidupan bermasyarakat, yaitu (1) adanya komitmen kebangsaan, (2) adanya sikap anti kekerasan, (3) adanya sikap toleransi, dan (4) adanya penerimaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perspektif ini, pada tataran implementasi sangat sesuai dengan program TPBIS yang bersifat inklusif, yang terbuka

terhadap semua pemeluk agama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termarginalkan tanpa membedakan latar belakangnya, baik dari gender, kondisi fisik, ras, etnis, agama, status sosial, dan ekonomi.

Analisis Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Berdasarkan Perspektif Pendidikan Moderasi Beragama Muhammadiyah Menurut Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan

Keberagaman merupakan modal dasar dari pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah. Keberagaman adalah maha karya Illahi yang nilainya tidak tertandingi. Hidup dalam keberagaman bukanlah satu pilihan melainkan ketetapan yang harus kita jalani. Menjalankan moderasi beragama dalam kehidupan yang plural adalah seni kehidupan yang telah dipandu oleh kitab suci (Al-Qur'an dan Hadis) (Muhammad Jailani, 2023). Pluralitas Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, ras, golongan dan budaya yang sangat beragam, yang ditandai dengan beratus-ratus suku yang berbeda-beda etnis (Muhammad Akhmadi dan Haifa Aziza, 2023). Keberagaman Di Nusantara tersebut tentu harus dikelola dengan baik dan tepat. Bukan hanya sekedar mengelola keragaman agar saling toleran dan menghargai namun lebih dari itu, pluralitas atau keragaman suku, bahasa, agama, ras, golongan dan budaya yang ada menjadi tantangan tersendiri (Achmad Faidi, Achmad Fauzi, dan Dimas Danar Septiadi, 2021) dalam pengelolaannya, untuk dapat mewujudkan masyarakat yang toleran dan harmoni serta berkeadilan, tidak bersifat eksklusif.

Dalam konteks keberagaman tersebut, perspektif pemikiran pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang toleran dan harmoni serta berkeadilan dan berkeadilan. Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dalam pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah tersebut, juga telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia, dalam mengisi program-program pembangunan, misalnya dalam bentuk program TPBIS yang sedang diimplementasikan oleh Perpustakaan RI. Prinsip-prinsip pendidikan dalam bentuk pembelajaran untuk memberdayakan masyarakat termarginalkan pada program TPBIS yang bersifat inklusif, memiliki kesamaan dengan 4-pilar moderasi beragama menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pilar Pertama: Adanya Komitmen Kebangsaan

Dalam perspektif pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah, komitmen kebangsaan dimaknai dengan bersama-sama berperan aktif dalam membangun masyarakat dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang bersifat inklusif. Ini sejalan dengan program TPBIS, yang menekankan perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang termarginalkan, melalui peran dan fungsi perpustakaan yang bersifat inklusif tanpa membedakan latar belakangnya, baik dari gender, kondisi fisik, ras, etnis, agama, budaya, status sosial, dan ekonomi.

Pilar Kedua: Adanya Sikap Anti Kekerasan

Sikap inklusif dari program TPBIS, telah menempatkan semua elemen masyarakat terutama yang termarginalkan untuk diberikan akses terhadap perpustakaan yang seluas-luasnya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa diskriminasi. Dalam perspektif pendidikan moderasi bergama Muhammdiyah, adanya sikap anti kekerasan dimaknai sebagai sikap (1) keadilan dan kebijaksanaan, dalam segala hal, baik secara pribadi maupun dalam bermasyarakat (2) toleransi dan penghormatan, dengan menghargai keberagaman tanpa diskriminasi, (3) menjaga akhlak mulia, menghindari perilaku kasar dan tindakan yang merugikan orang lain, (4) mengutamakan keadilan gender, serta (5) berempati dan peduli. Ini sejalan dengan program TPBIS yang menekankan empati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termarginalkan, yaitu masyarakat yang terpinggirkan

Pilar Ketiga: Adanya Sikap Toleransi

Sikap inklusif dari program TPBIS, telah menempatkan semua elemen masyarakat terutama yang termarginalkan untuk diberikan akses terhadap perpustakaan yang seluas-luasnya tanpa membedakan latar belakangnya, baik dari gender, kondisi fisik, ras, etnis, agama, status sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif pendidikan moderasi bergama Muhammdiyah, adanya sikap toleransi ini dimaknai sebagai sikap (1) toleransi dan penghormatan, dengan menghargai keberagaman tanpa diskriminasi, (2) menjaga akhlak mulia, menghindari perilaku kasar dan tindakan yang merugikan orang lain, serta (3) berperilaku moderat dalam konflik. Ini sejalan dengan program TPBIS, yang menekankan perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang termarginalkan dengan tanpa ada pengecualian secara sosial.

Pilar Keempat: Adanya Sikap Penerimaan Terhadap Nilai-Nilai Budaya Lokal

Pada program TPBIS, dalam melakukan pendampingan pembelajaran terhadap para peserta didik dilakukan melalui pendekatan berbasis pada nilai-nilai budaya lokal, misalnya bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan peningkatan produk yang berbasis budaya lokal, pedagang kaki lima dengan peningkatan produk yang berbasis makanan-makanan dengan nuansa budaya lokal, kelompok PKK dengan peningkatan produk yang berbasis fashion dan asesoris yang berbasis budaya lokal, pemberdayaan petani, pemberdayaan peternak, pemberdayaan masyarakat prasejahtera, pegiat literasi dan lain-lain yang berbasis budaya lokal. Dalam perspektif pendidikan moderasi beagama Muhammdiyah, adanya sikap penerimaan terhadap nilai-nilai budaya lokal ini dimaknai sebagai sikap (1) cenderung mencari pemahaman dengan dialog dan diskusi, dalam mensikapi perbedaan, (2) mengutamakan keadilan gender, (3) mengedepankan kesejahteraan sosial, dengan berbasis nilai-nilai budaya lokal (4) berempati dan peduli, yang bersifat inklusif. Dalam perspektif ini, artinya pada program TPBIS yang bersifat inklusif tersebut telah menerapkan pilar moderasi beragama, yaitu bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal.

4. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan perspektif pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, memiliki kesamaan yaitu sama-sama bersifat inklusif dan moderat tanpa membedakan latar belakang peserta didik, seperti gender, kondisi fisik, ras, etnis, agama, budaya, status sosial, dan ekonomi serta sama-sama menekankan adanya keberpihakan terhadap masyarakat yang termarginalkan (masyarakat yang dikecualikan secara sosial).
2. Penerapan program TPBIS yang bersifat inklusif, sangat sesuai dengan perspektif pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, dalam konteks tafsir agama dan keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Karena dalam pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran, dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
3. Pada Program TPBIS, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termarginalkan, merupakan program yang memiliki perspektif yang sangat dijiwai oleh 4-pilar pendidikan moderasi beragama Muhammadiyah menurut pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, yaitu (1) adanya sikap komitmen kebangsaan, (2) adanya sikap toleransi, (3) adanya sikap anti kekerasan, serta (4) adanya sikap akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'ti. 2021. Moderasi Beragama Dalam Perspektif Muhammadiyah. Yogyakarta: <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/moderasi-beragama-dalam-perspektif-muhammadiyah/> Diakses Tanggal 16 Desember Tahun 2024.
- Achmad Faidi, Achmad Fauzi, dan Dimas Danar Septiadi. 2021. Signifikansi Penegakan Budaya Hukum Terhadap Toleransi Masyarakat Madura Melalui Kurikulum Inklusif Di IAIN Madura (*Significance of Legal Culture Enforcement on Tolerance among Madurese Society through Inclusive Curriculum at IAIN Madura*). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Volume 16 Masalah 1, Halaman 50–67. Retrieved from <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/4302> Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2024.
- Akhlanudin Uhamka. 2016. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Purifikasi Dan Modernisasi. Jakarta: Situs Resmi Gema Uhamka. <https://simakip.uhamka.ac.id> Diakses Tanggal 18 Desember 2024.
- Ai Fatimah Nur Fuad. 2018. Purifikasi Dan Modernisasi Dalam Dakwah Muhammadiyah: Studi Kasus Muhammadiyah Ranting Ulujambi Jakarta Selatan. Laporan Penelitian Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan. Jakarta: Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. <https://simakip.uhamka.ac.id> Diakses Tanggal 18 Desember 2024.
- Ari Farizal Rasyid dan Anwar Taufik Rakhmat. 2023. Peran Pemuda Muhammadiyah Dalam Membangun Moderasi Beragama. Tasikmalaya, Indonesia: Universitas Siliwangi

- Indonesia. <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/moderasi-beragama-dalam-perspektif-muhammadiyah/> Diakses Tanggal 17 Desember 2024.
- Ayu Rifka Sitoresmi. 2023. *Pengertian Islam Wasathiyah Dan Ciri-Ciri Umatnya Yang Wajib Diketahui*. Jakarta: Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5382070/pengertian-islam-wasathiyah-dan-ciri-ciri-umatnya-yang-wajib-diketahui> Diakses Tanggal 18 Desember 2024.
- Budiman, Murniyanto, dan Deri Wanto. 2022. *Sejarah Pendidikan Islam Muhammadiyah Di Era Moderasi Di Muhammadiyah Rejang Lebong*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Volume 6 Nomor 3, Juli-September 2022. 1069-3479-1- PB.pdf ; 9 halaman . 118 kB . PDF Diakses Tanggal 17 Desember Tahun 2024.
- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya. 2024. *Perpusnas Hadirkan Program TPBIS Dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 Dengan Model Baru*. Tasikmalaya: Dipusipda Kota Tasikmalaya.
<https://dipusipda.tasikmalayakota.go.id/site/beritadetail?id=102259> Diakses Tanggal 16 Desember Tahun 2024.
- Haedar Nashir. 2021. *Muhammadiyah Hadapi Dinamika Baru*. Muhammadiyah.or.id.
<https://muhammadiyah.or.id/2021/07/muhammadiyah-hadapi-dinamika-baru/#:~:text=Ke%20depan%20muhammadiyah%20niscaya%20memiliki,yang%20berbasis%20pada%20karakter%20Muhammadiyah> Diakses Tanggal 18 Desember 2024.
- Haedar Nashir. 2023. *Pengayaan Purifikasi dan Dinamisasi*. Majalah Suara Muhammadiyah Edisi 3 Tahun 2022. <https://we.suaramuhammadiyah.id/2022/09/22/pengayaan-purifikasi-dan-dinamisasi/#:~:text=Majelis%20Tarjih%20di%20kemudian%20hari,pengamalan%20Islam%20yang%20sebesar%20benarnya> Diakses Tanggal 18 Desember 2024.
- Hasbulallah. 2024. *Muhammadiyah Dan Tantangan Moderasi Beragama Di Indonesias*. Jurnal Kanjian Pendidikan Islam. Volume 3 Nomor 2, Juli 2024. Lampung: Universitas Muhammadiyah Pringsewu.
<https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/jkpi/article/view/138> Diakses Tanggal 16 Desember Tahun 2024.
- Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. 2024. *Muhammadiyah Tetap Menjaga Tauhid Dalam Melihat Budaya*. Yogyakarta: MUHAMMADIYAH.OR.ID.
[https://muhammadiyah.or.id/2024/03/muhammadiyah-tetap-menjaga-tauhid-dalam-melihat-buaya/#:~:text=MUHAMMADIYAH.%20OR.,Universitas%20Muhammadiyah%20Yogyakarta%20\(UMY\)](https://muhammadiyah.or.id/2024/03/muhammadiyah-tetap-menjaga-tauhid-dalam-melihat-buaya/#:~:text=MUHAMMADIYAH.%20OR.,Universitas%20Muhammadiyah%20Yogyakarta%20(UMY)) Diakses Tanggal 18 desember 2024.
- Mayske Rinny Liando dan Hadirman. 2022. *Praktik Kultur Moderasi Beragama Dalam Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (Studi Di SMA Muhammadiyah Manado)*. Edukasi Islami: jurnal Pendidikan Islam. Volume 11 Nomor 01 Februari 2022. admin, +25.+379-392.pdf Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2024.
- Mohammad Dzaky Zaidan, Elisha Qotrunnada, Khansa Labiibah Hasna, Al Bani Ridho Pratama, dan Abdul Fadhil. 2024. *Moderasi Beragama Sebagai Pilar Kebhinekaan: Telaah Pemikiran Kh. Hasyim Asy'ari dan Kh. Ahmad Dahlan*. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial JIPSI Volume 3 Nomor 4, Januari 2025. Jakarta: Pendidikan Aagama Islam,

- Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Publish+artikel.pdf; 11 halaman . 248 kB . PDF. Diakses Tanggal 17 Desember Tahun 2024.
- Muhammad Akhmadi dan Haifa Aziza. 2023. Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Volume 2 Nomor 6 2023: November: *Religion*:
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/736> Diakses Tanggal 18 Desember 2024.
- Muhammad Jailani. 2023. Merespons Pendidikan Muhammadiyah Di Era Neuroteknologi: Perspektif *Neurosains* Dan Moderasi Beragama. *Jurnal Waiheru* 12 Volume 9 Nomor 2, Tahun 2023. 54ecfd0713e241f7ef9160aa0b1bd473811f (1).pdf Diakses Tanggal 17 Desember 2024.
- Nina. 2023. 9 Kunci Moderasi Beragama. Palangkaraya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Kalimantan Tengah.
<https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/517534/Nina-9-Kunci-Moderasi-Beragama#:~:text=Berikut%20ini%20adalah%20sembilan%20kata,Penghormatan%20kepada%20Tradisi%2C%E2%80%9Djelasnya> Diakses Tanggal 16 Desember Tahun 2024.
- Perpusnas RI. 2023. TPBIS Wujud Komitmen Indonesia Terhadap Pembangunan Global. Jakarta: Perpusnas RI, 2023-11-13. <https://www.perpusnas.go.id/berita/tpbis-wujud-komitmen-indonesia-terhadap-pembangunan-global> Diakses Tanggal 16 Desember Tahun 2024.
- Perpusnas RI. 2024. Peta Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. <https://transformasi.perpusnas.go.id/> Diakses Tanggal 16 Desember Tahun 2024.
- Seminar Munas Majelis Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2020. Muhammadiyah Dan Moderasi Beragama, Perspektif Islam Berkemajuan. Bahan Seminar Munas Majelis Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 13 Desember 2020. Sumber: JIBPost.id, Ahad, 13 Desember 2020. (mf).<https://www.uinjkt.ac.id/id/muhammadiyah-dan-moderasi-beragama-perspektif-islam-berkelanjutan> Diakses Tanggal 18 desember 2024.